



## Pengaruh Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2017-2021

Rinaldi Antoni<sup>1</sup>, Lisa Efrina<sup>2</sup>, Estelee Elora Akbar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

### Article History:

Received: Februari 10, 2023  
Revised: Februari 20, 2023  
Accepted: Maret 01, 2023  
Published: Maret 8, 2023

### Keywords:

Komisaris Independen, DPS, dan Manajemen Laba

### \*Correspondence Address:

rinaldiantoni@gmail.com

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh komisaris independen dan dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Dengan metode pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (Annual Report). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 14 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dan menggunakan program Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris independen yang diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dewan pengawas syariah yang diukur dengan jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan semakin banyak komisaris independen maka semakin turun praktek manajemen laba, dan dewan pengawas syariah hanya sebagai pemenuhan regulasi saja.

## INTRODUCTION

Pada akhir-akhir ini banyak terjadi fenomena dimana laporan keuangan suatu perbankan tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemilik dan pihak pengelola. Adanya tindakan manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba melalui kebijakan-kebijakan akuntansi terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perbankan akan mempengaruhi laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan

pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor.

Kemunculan Bank Syariah Indonesia, ditengah masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah kaum muslim adalah alternatif untuk melakukan hijrah keuangan sesuai dengan keyakinan yang di peluk. Perkembangan bank syariah terjadi sangat pesat pada dekate akhir ini, sehingga lembaga keuangan syariah memiliki peluang besar dalam melebarkan sayapnya untuk dapat meningkatkan eksistensi di Indonesia. Meski demikian lembaga keuangan bank syariah tetap harus memiliki

upaya dalam mempertahankan eksistensinya saat ini dengan mentaati prinsip syariah Islam dan juga menyeimbangi melalui penjagaan terhadap kinerja perusahaan (Akbar 2023).

Dengan adanya komisaris independen di perbankan syariah yang bertugas dan diberi tanggung jawab untuk mengawasi kualitas informasi yang ada pada laporan keuangan, dengan begitu dewan komisaris independen dapat mengawasi pihak-pihak yang berkaitan di perusahaan termasuk mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh manajer dalam mengelola operasional perusahaan untuk mencegah manajer melakukan kecurangan pada laporan keuangan (Efrina 2022).

Penyusunan laporan keuangan manajemen perusahaan banyak menggunakan konsep akrual basis karena dapat memberikan informasi yang lebih baik tentang kinerja ekonomi perusahaan dibandingkan informasi yang dihasilkan dari cash basis. Dengan menggunakan metode akrual basis dapat memudahkan manajer perbankan syariah dalam mengelola laba perbankan syariah tanpa menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan Yang Berlaku Umum karena telah memilih metode akuntansi yang sesuai. Apabila target perbankan syariah tidak tercapai maka pihak manajer perbankan syariah dapat mengubah komponen-komponen akrual yang dilaporkan (Intia and Azizah 2021).

Adanya tindakan manajemen laba (*earning management*) di dalam suatu perusahaan yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan (*agent*) dan pihak pemilik atau berkepentingan (*principal*) merupakan masalah yang sering terjadi dalam perusahaan. Dalam hal ini manajemen mempunyai informasi tentang perusahaan secara lebih luas dibandingkan pemiliknya. Kesenjangan informasi ini sering mendorong perilaku manajemen untuk menyajikan laporan

keuangan dengan menaikkan atau menurunkan laba guna memaksimalkan keuntungan pribadi melalui kebijakan-kebijakan yang digunakan, misalnya dengan melakukan *creative accounting* dengan tujuan agar kinerja agen terlihat bagus, karena agen mengetahui kondisi internal perusahaan dan prospek perusahaan dimasa mendatang (Ash-Shiddiqy 2019). Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi tiga yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentu manusia melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Asmarita et al. 2022).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam pengungkapan laporan keuangan perbankan syariah harus dilakukan secara transparan karena informasi yang sesuai dan memadai begitu penting dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di perbankan syariah. Dalam penyediaan laporan keuangan, perbankan syariah wajib untuk mematuhi standar yang telah ditentukan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Melalui kebijakan yang diambil agen sebagai pengelola perusahaan dapat melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri dengan dinilai kinerjanya baik oleh pihak pemilik sehingga akan mendapatkan bonus atau naik jabatan dari kinerjanya tersebut. Sedangkan prinsipal selaku pemilik perusahaan hanya dapat mengawasi jalannya perusahaan melalui informasi yang diberikan agen (Einde Evana 2017). Informasi yang disajikan oleh pihak agen tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Keterkaitan *agency theory* dalam

penelitian ini adalah karena manajemen laba merupakan bentuk agency problem. Manajemen laba terjadi karena adanya assimetric information antara manajemen selaku agen dan pemilik perusahaan selaku principle.

Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan, agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan (Azizah and Nr 2020). Praktek manajemen laba dengan tujuan kepentingan pribadi dapat merugikan investor dan pemegang saham, investor tidak mendapat informasi yang sebenarnya mengenai posisi keuangan perusahaan dan tindakan manajemen laba dapat menurunkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

### **THEORETICAL SUPPORT**

Teori keagenan (agency theory) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut sebagai agen dan pemilik modal (owner) sebagai prinsipal membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan “nexus of contract”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberikan kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal atau owner.

Principal sebagai pemilik perusahaan, berkewajiban menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan, sedangkan agent sebagai pengelola perusahaan

berkewajiban mengelola perusahaan yang dipercayakan oleh pemegang saham padanya, untuk memakmurkan dan keuntungan pemegang saham, melalui peningkatan nilai perusahaan. Untuk itu agen dalam hal ini sebagai manajer perusahaan, akan memperoleh gaji dan bonus dan berbagai kopensasi lainnya. Dalam situasi seperti ini dapat terjadinya sikap oportunistik (opportunistic behavior) oleh manajer yang ditunjuk untuk menjalankan operasional perusahaan tidak dijalankan dengan baik, atau bertindak hanya untuk kepentingan pribadi. Hubungan antara pemegang saham dan manajemen dalam suatu perusahaan sering disebut dengan istilah Agency relationship (Umam 2020).

Hubungan ini timbul pada saat prinsipal menggaji seorang agen dalam kaitanya mewakili kepentingan prinsipal. Dalam situasi seperti ini sering terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen yang mewakili kepentingan prinsipalnya. Konflik kepentingan tersebut disebut dengan Agency Problem. Dengan demikian, Agency Problem adalah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham (stockholders) dengan manajemen dalam perusahaan (Anggreni, Novianty, and Muflih 2016).

Pihak agen menguasai informasi secara maksimal (full information) dan disisi lain pihak prinsipal memiliki keunggulan kekuasaan (discretionary power) atau memaksimalkan kekuasaan sehingga kedua pihak ini sama-sama memiliki kepentingan pribadi (self-interest) dalam setiap keputusan yang diambil, salah satu efek yang jauh biasa terjadi adalah perolehan deviden yang rendah yang akan diterima oleh prinsipal karena faktor perubahan metode yang dilakukan oleh agen. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah/Investment Account Holder (IAH) dan pemilik perusahaan (Ahadiyah

Agustina 2019). Masalah agensi tidak hanya terjadi antara pemegang saham dengan agen, tetapi juga terjadi antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali.

Watts dan Zimmerman dalam teori agensi juga dikenal adanya informasi yang tidak seimbang yang disebut Asimetri informasi (information asymmetry). Asimetri informasi ini muncul sebagai akibat adanya distribusi informasi yang tidak sama antara pemilik dan manajer. Menurut Jensen dan Meckling menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara prinsipal dan agen adalah sebagai berikut (Oktaviani 2016).

1. Moral Hazard Moral Hazard merupakan permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja, atau menyeleweng dari kesepakatan yang telah ditetapkan.
2. Adverse selection Adverse selection merupakan suatu tindakan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu kepentingan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kesalahan tugas.

Dalam pelaksanaannya, terjadi konflik kepentingan antara agen dan principal tersebut, dimana agen memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri yaitu mendapatkan bonus atas kinerja perusahaan, sehingga manajemen selaku agen akan menge-lola laba untuk kepentingan sendiri. Adanya konflik kepentingan tersebut, dibutuhkan adanya fungsi pengawasan sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi (Suprihatin 2017).

## **METHOD**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Anshori and Iswati 2019).

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik.

Populasi adalah sekelompok kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode tahun 2017–2021. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 14 Perbankan Syariah yang terdaftar pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut.

### **Regresi Data Panel**

Penelitian ini menggunakan data panel untuk proses analisisnya. Data dengan karakteristik panel adalah data yang berstruktururut waktu sekaligus cross-section. Data semacam ini dapat diperoleh misalnya dengan mengamati sekerangkaian observasi cross-section (antar individu) pada suatu periode tertentu.

Data panel sering dikenal sebagai data pooled (menumpuk observasi runtun waktu dengan individual), kombinasi data runtun waktu dan individual, dan mikripanel, data longitudinal (sebuah studi dari waktu ke waktu terhadap subjek

yang telah berhasil melalui berbagai keadaan atau kondisi). Meskipun ada beberapa variasi, semua nama ini berarti pergerakan dari waktu ke waktu dari unit-unit individual.

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross-section. Dengan hanya menggunakan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka dapat menghasilkan metode OLS (*OLS Pooled/Common Effect Model (CEM)*) untuk mengestimasi model data panel.

*Fixed Effect* Pendekatan metode kuadrat terkecil biasa adalah pendekatan dengan mengasumsikan bahwa intersep dan koefisien regressor dianggap konstan untuk seluruh unit wilayah/daerah maupun unit waktu. Salah satu cara untuk memperhatikan unit cross section atau unit time series adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk memberikan perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit cross section maupun unit time series.

*Random Effect* Dalam mengestimasi data panel dengan model fixed effect melalui teknik variabel dummy menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengestimasi masalah ini dapat digunakan variabel residual yang dikenal dengan model random effect (REM).

### Uji Chow

Uji chow adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan menggunakan common effect atau fixed effect. Kriteria dengan pengujian ini adalah dengan hipotesis:

H0 = Model common effect

H1 = Model fixed effect

Dengan kriteria pengambilan keputusan ( $\alpha = 0,05$ ): (a) Jika nilai probability cross-section chi-square  $\leq 0.05$  maka H0 ditolak, sehingga akan menggunakan model fixed effect; (b) Jika nilai probability cross-section

chi square  $> 0.05$  maka H0 diterima sehingga yang digunakan adalah model common effect.

### Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam memilih apakah menggunakan model fixed effect atau model random effect. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 = Model Random effect

H1 = Model Fixed effect.

Dasar penolakan terhadap H0 adalah dengan mengikuti distribusi chi square statistic dengan degree of freedom sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik hausman (chi square statistic)  $>$  nilai kritis chi square maka H0 ditolak atau model yang tepat adalah fixed effect. Sebaliknya, jika nilai statistik hausman (chi square statistic)  $<$  nilai kritis chi square maka H0 diterima atau model yang tepat adalah random effect. Selain itu pengambilan keputusan juga dapat didasarkan dari nilai probabilitas, dimana jika p-value  $< 0,05$  maka H0 ditolak.

### Uji Parsial (t-test)

Uji t adalah pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara parsial. Uji ini dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).<sup>98</sup> Langkah-langkah hipotesis dalam uji t adalah sebagai berikut :

Membuat rumusan hipotesis, yaitu nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1).

H0 = variabel komisaris independen dan dewan pengawas syariah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba.

H1 = variabel komisaris independen dan dewan pengawas syariah secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Keputusan untuk menolak atau menerima  $H_0$  adalah sebagai berikut :

Jika nilai  $t$  statistik  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

Jika nilai  $t$  statistik  $>$  maka  $H_0$  diterima.

Ketika  $H_0$  ditolak, berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya ketika  $H_0$  diterima berarti variabel independen secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

#### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ini menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai  $R^2$  atau ( $R^2$  adjusted ) berkisar antara 0-1, semakin mendekati 1 semakin baik.

## **RESULT AND DISCUSSION**

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa Variabel Komisaris Independen ( $X_1$ ) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.171175 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio anggota dewan komisaris independen terhadap total jumlah dewan komisaris sebesar 17,1175%, nilai minimum sebesar 0.4 yang menunjukkan bahwa nilai terendah rasio komisaris independen terhadap total jumlah dewan komisaris sebesar 40%. Nilai maksimum sebesar 1,00 menunjukkan bahwa nilai tertinggi rasio komisaris independen terhadap total jumlah dewan komisaris sebesar 100%. Sedangkan nilai standard deviasi sebesar 0.190437 menunjukkan bahwa rata-rata penyimpangan nilai komisaris independen terhadap rata-rata industri adalah sebesar 19,00437%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa emiten telah

memenuhi ketentuan tentang Dewan Komisaris Independen yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen minimum adalah sebesar 30% sedangkan hasil dalam penelitian ini adalah sebesar 40%.

Sedangkan variabel Dewan Pengawas Syariah ( $X_2$ ) memiliki nilai rata-rata sebesar 14,475 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dewan pengawas syariah sebesar 14,475%. nilai minimum sebesar 9,00 yang menunjukkan bahwa nilai terendah dewan pengawas syariah adalah 900%. Nilai maksimum sebesar 30,00 menunjukkan bahwa nilai tertinggi dewan pengawas syariah sebesar 3000%. Nilai standard deviasi sebesar 3.915698 menunjukkan bahwa rata-rata penyimpangan nilai dewan pengawas syariah terhadap rata-rata industri adalah sebesar 391,569,800%. secara umum dapat disimpulkan bahwa emiten belum memenuhi ketentuan Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat paling kurang satu kali dalam satu bulan atau sama dengan 12 kali dalam setahun, sedangkan dalam penelitian ini nilai minimum dewan pengawas syariah adalah sebesar 9.

Berdasarkan table diatas hasil uji yang menggunakan metode pooled Least Square/Common Effect menunjukkan bahwa dari kedua variabel bebas yang digunakan terdapat satu variabel independen (Dewan Pengawas Syariah) yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Manajemen Laba). Dengan nilai signifikan pada masing-masing variabel yaitu  $KI : 0,1269$  dan  $DPS : 0.0299$ . Dari hasil output diatas variabel  $DPS$  ( $X_2$ ) dengan nilai sebesar 0.0299 lebih kecil dari aturan taraf signifikan yang sudah ditentukan yaitu sebesar 0,05 (5%). Setelah lulus menguji model Common Effect langkah selanjutnya adalah menguji dengan Model Fixed Effect.

Berdasarkan hasil analisis diatas yang menggunakan Metode Fixed Effect dapat dilihat bahwa nilai signifikan pada masing-masing variabel yaitu: Komisaris Independen (X1) sebesar 0,6658 dan Dewan Pengawas Syariah (X2) sebesar 0,8851. Setelah lulus menguji Model Fixed Effect langkah selanjutnya adalah menguji dengan Model Random Effect.

Berdasarkan hasil analisis diatas yang menggunakan Metode Fixed Effect dapat dilihat bahwa nilai signifikan pada masing-masing variabel yaitu: Komisaris Independen (X1) sebesar 0,6658 dan Dewan Pengawas Syariah (X2) sebesar 0,8851. Setelah lulus menguji Model Fixed Effect langkah selanjutnya adalah menguji dengan Model Random Effect.

### **Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba**

Berdasarkan hasil pengujian variabel komisaris independen memiliki probabiliti sebesar 0,0182 lebih kecil dari p-value sebesar 0,05, maka H0 ditolak yang berarti variabel komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Selanjutnya dapat dilihat nilai koefisien sebesar - 0,792735 yang menunjukkan hubungan secara negatif, dimana semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan semakin kecil tingkat praktek manajemen laba dan pengawasan yang dilakukan komisaris independen semakin berkualitas yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Hal ini sesuai dengan Teori Agensi, dimana teori ini menjelaskan tentang konflik kepentingan antara pihak pengelola dan pemilik perusahaan. Dimana Dewan komisaris independen bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi, dengan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu oleh Dewan Komisaris, mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi

penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen perusahaan. Dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan yang bekerja secara maksimal dapat mengurangi praktek manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

### **Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan yang ditunjukkan variabel dewan pengawas syariah yang dihitung dari jumlah rapat dewan pengawas syariah memiliki probabiliti sebesar 0,676 lebih besar dari p-value sebesar 0,05, maka H1 ditolak yang berarti variabel dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Hal ini tidak sesuai dengan Teori Agensi, dimana teori ini menjelaskan tentang konflik kepentingan antara pihak pengelola dan pihak pemilik perusahaan. Namun dalam penelitian ini membuktikan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen ini artinya semakin banyaknya jumlah rapat dewan pengawas syariah maka akan semakin naik praktek manajemen laba di perbankan syariah, dikarenakan dewan pengawas syariah tidak mengawasi secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan.

Kurang mampunya dewan pengawas syariah dalam menurunkan praktek manajemen laba dalam perbankan syariah ialah dikarenakan terdapat beberapa perbankan syariah yang melakukan rapat dewan pengawas syariah kurang dari ketentuan yang diatur melalui Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 49 ayat 1, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat paling kurang satu kali dalam satu bulan. Namun terlihat dalam statistik deskriptif perbankan syariah melakukan rapat dewan pengawas syariah kurang dari 12

kali, hal ini mengidentifikasi bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak akan mengurangi praktek manajemen laba di perbankan syariah.

## CONCLUSION

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen dan dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama tahun penelitian 2017-2021. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan secara Parsial dapat ditarik kesimpulan bahwa Komisaris independen yang diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris terbukti berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba. artinya komisaris independen terbukti mampu mengurangi praktek manajemen laba di bank umum syariah di Indonesia.

Dewan pengawas syariah yang diukur dengan jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah rapat Dewan pengawas syariah maka akan semakin tinggi praktek manajemen laba. maka diharapkan dewan pengawas syariah lebih meningkatkan pengawasan terhadap pihak manajemen agar informasi yang terkandung didalam dalam laporan keuangan semakin baik dan berkualitas.

## REFERENCES

- Ahadiyah Agustina. 2019. "Pengaruh Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Earnings Management Pada Perbankan Syariah Di Indonesia."
- Akbar, Estelee Elora. 2023. "RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA" 2.
- Anggreni, Meilinda, Ira Novianty, and Muhammad Muflih. 2016. "PENGARUH KOMITE AUDIT, DEWAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH: ESTIMASI PENGARUH LANGSUNG DAN PERAN MEDIASI MANAJEMEN LABA." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 8 (1): 19–38. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i1.12203>.
- Anshori, and Iswati. 2019. *ANSHORI, Muslich; ISWATI, Sri. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1. Airlangga University Press, 2019.* <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ltq0DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=sugiyono+metodologi+kuantitatif&ots=gLpPpfzQ8q&sig=6FfiJzt9KO7lBTisFBZfStLUaTc>.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. 2019. "DETERMINASI MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN YANG TERKATEGORI DAFTAR EFEK SYARIAH" 7 (2).
- Asmarita, Yeni, Andi Warisno, Estelee Elora Akbar, and Lisa Efrina. 2022. "PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK RESELLER (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in)." *Jurnal Manajemen* 01 (04).
- Azizah, Jumainii, and Erinoss Nr. 2020. "Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah." *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI* 2 (1): 2554–69. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.229>.

- Efrina, Lisa. 2022. "Efforts to Improve Community Welfare Through Farming Group Empowerment from an Islamic Economic Perspective." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 2 (2): 95–109. <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i2.1799>.
- Einde Evana. 2017. "THE EFFECT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS, MANAGERIAL OWNERSHIP, AND AUDIT COMMITTEE ON ACCOUNTING CONSERVATISM."
- Intia, Laras Clara, and Siti Nur Azizah. 2021. "PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 7 (2). <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i2.4860>.
- Oktaviani, Happy Dwi. 2016. "PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN UKURAN KOMITE AUDIT TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2009 - 2014."
- Suprihatin, Neneng Sri. 2017. "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS DALAM MENDETEKSI PRAKTIK MANAJEMEN LABA Kodriyah" 4 (2).
- Umam, Mochamad Febri Sayidil. 2020. "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia" 3 (1).